

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Bagian ini menjelaskan sub-bab yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, definisi operasional, dan struktur organisasi tesis.

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pendidikan masyarakat adat dapat dimaknai sebagai suatu proses pendidikan yang bersumber pada perwujudan kearifan lokal atau pengetahuan adat di masing-masing persebaran wilayah adat. Sistem pendidikan yang dilaksanakan pun senantiasa mencerminkan nilai-nilai kehidupan, tradisi, dan budaya yang selama ini diyakini dan diterapkan di lingkungan masyarakat adat. Keunikan dan kekhasan dari perwujudan nilai-nilai budaya, bahasa, serta tradisi-tradisi yang diterapkan inilah mampu menopang eksistensi keberadaan masyarakat adat di tengah gempuran arus globalisasi. Dalam pernyataan *Coolangatta*, pendidikan masyarakat adat disebutkan sebagai media pengembangan pribadi dan pemberdayaan intelektual untuk kelangsungan dan pelestarian budaya (Blair,2006). Selain itu, Vass (2022) menilai pendidikan untuk masyarakat adat baik di komunitas dan setiap individu merupakan pusat pelestarian budaya dan pengembangan keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan untuk menjadi bagian penting dari abad kedua puluh satu. Berkaitan dengan pendidikan masyarakat adat, negara telah menjamin hak-hak masyarakat adat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Hal ini dapat ditemukan pada Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Selain itu, regulasi yang secara khusus mengatur pendidikan bagi masyarakat adat sebelumnya juga tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu Pasal 4, Pasal 5 Ayat (3), Pasal 32 Ayat (2) menjamin keberadaan pendidikan adat. Hal ini juga diperkuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2013) serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 tahun 2013 (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2016), yang salah satunya mencakup aturan terkait dengan pelaksanaan pendidikan layanan khusus untuk masyarakat adat. Namun, aturan ini belum dapat diimplementasikan secara langsung. Realitas keberadaan masyarakat adat di Indonesia yang sangat beragam, khususnya terkait kondisi geografis, kontak-kontak dengan budaya luar, dan akses terhadap pendidikan menjadikan PLK untuk masyarakat adat sangat bervariasi. Tidak ada suatu model yang dapat diterapkan pada semua ekosistem masyarakat adat di Indonesia. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan bagi masyarakat adat, tidak dapat diperlakukan secara seragam. Selain itu, Namun, implementasi pendidikan layanan khusus yang diusulkan tidak optimal karena tidak memiliki pedoman teknis yang diperlukan atau tidak digunakan di lapangan (Kepala Puslitjak Dikbud dalam Biantoro, 2019).

Dalam studinya tentang pendidikan kontekstual masyarakat adat di Indonesia, Biantoro (2021) menyatakan setidaknya ada empat model pendidikan masyarakat adat: Integrasi, Konservatif, Komplemen, dan Transformatif. Keempat model pendidikan di atas berbeda satu sama lain. *Model pertama*, terintegrasi dengan pendidikan formal melalui mata pelajaran. Ini terlihat dalam mata pelajaran muatan lokal, yang biasanya hanya diajarkan satu minggu sekali. *Model kedua* berada di luar sistem pendidikan Nasional. Model ini tidak memasukkan sistem pendidikan nasional ke dalam model pendidikannya, ini disebut sebagai model konservatif. Komunitas Orang Rimba di Makekal, Hulu, Jambi, menggunakan model ini. *Ketiga*, model pendidikan berbasis layanan yang melengkapi pendidikan formal dengan pendidikan masyarakat adat. *Terakhir* adalah model pendidikan transformatif. Model ini hampir identik dengan model konservatif, tetapi membuka peluang bagi siswa untuk beralih ke pendidikan formal.

**Nurbaya Pulhehe, 2024**

**DESAIN KOMPETENSI PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL BAHASA BURU PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN BURU**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Sejatinya pendidikan masyarakat adat menjadi wadah untuk mengembangkan pendidikan budaya yang selama ini dianut. Salah satu langkah untuk tetap memaksimalkan pendidikan masyarakat adat adalah dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan terhadap salah satu adat istiadatnya yakni bahasa. Hal ini dilakukan agar menjaga daya hidup bahasa asal mereka. Hubungan antara keempat model pendidikan dalam kajiannya Biantoro dengan penelitian ini adalah untuk menentukan dasar pijakan utama dalam menganalisis alur pendidikan masyarakat adat jenis model integrasi dalam kurikulum Nasional, yaitu muatan lokal bahasa daerah. Penerapan kurikulum berkonten lokal di Indonesia, terutama untuk bahasa daerah, memiliki peluang maupun tantangan. Beberapa Penelitian menunjukkan bahwa sekolah umumnya menunjukkan dukungan untuk kurikulum ini melalui dukungan kebijakan dan penyediaan bahan pembelajaran. Namun, ada tantangan seperti kurangnya keragaman dalam buku teks, kurangnya minat siswa, dan sumber daya guru yang tidak memadai menghambat penerapannya yang lebih efektif (Yuyun & Ardiansyah, 2021). Evaluasi pelaksanaan muatan lokal menunjukkan hasil yang umumnya positif, meskipun ada kebutuhan untuk perbaikan dalam aspek input dan proses (Ferdianto & Rusman, 2018). Untuk pendidikan khusus, konten lokal disesuaikan dengan karakteristik unik siswa, dengan fokus pada keterampilan praktis untuk kehidupan sehari-hari (Wirantho et al. 2020). Hal ini karena muatan lokal memainkan peran penting dalam melestarikan bahasa daerah dengan mengintegrasikannya ke dalam sistem pendidikan dan mempromosikan kesadaran budaya di kalangan siswa (Angraeni, 2020).

Seiring berkembangnya tujuan untuk mencapai pendidikan Nasional, melalui peraturan perumusan tujuan Kemendikbud Ristek untuk mencapai mutu pendidikan nasional saat ini juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Adapun tujuan yang dimaksud dan berkaitan

dengan penyelenggaraan pendidikan masyarakat adat termuat dalam tujuan 1 dan 3, yakni: 1. Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif; dan 3. Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa, dan sastra serta pengarus utamaannya dalam pendidikan. Menilik poin ketiga yang berfokus pada pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa, dan sastra menyiratkan pentingnya pendidikan berkeadilan bagi masyarakat adat. Melalui rencana strategis inilah pendidikan masyarakat adat menjadi bagian penting dalam cakupan pendidikan secara nasional. Berdasarkan data temuan Habiburrahman (2016), Indonesia merupakan rumah bagi keragaman bahasa daerah yang luar biasa, dengan total 746 bahasa di seluruh kepulauannya. Namun, masa depan bahasa-bahasa ini tidak menentu karena mereka menghadapi ancaman kepunahan. Saat ini, Indonesia secara resmi mengakui 718 bahasa daerah (Josephine, 2022), yang menunjukkan penurunan jumlah bahasa yang terus berkembang. Kepunahan bahasa-bahasa ini dapat dikaitkan dengan berbagai faktor seperti kurangnya dukungan pemerintah, dampak globalisasi yang meluas, dan berkurangnya penggunaan bahasa daerah dalam komunikasi sehari-hari (Josephine, 2022).

Di beberapa daerah seperti Maluku Tenggara, bahasa lokal hanya digunakan oleh orang tua, dan transmisi bahasa-bahasa ini ke generasi muda terhambat (Dwiningsih & Agustini, 2021). Melindungi dan mempertahankan bahasa daerah adalah sebuah keharusan karena mereka mencerminkan warisan budaya, identitas, dan sejarah komunitas masing-masing. Untuk merespon kepunahan bahasa daerah, pada tahun 2022 melalui program revitalisasi bahasa daerah, Kemendikbud Ristek meluncurkan Merdeka Belajar episode ke-17 tentang Revitalisasi Bahasa Daerah. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengembangkan model konservasi dan revitalisasi bahasa daerah dengan tujuan melestarikan dan mengembangkan warisan bahasa daerah untuk generasi mendatang (Siregar et al. 2023; Pulhehe, 2024). Program ini menysasar 13 provinsi di Indonesia dan melibatkan siswa sekolah dasar dan menengah. Program ini menerapkan empat model revitalisasi, yaitu Model A untuk bahasa daerah dengan karakteristik bahasa masih

aman dan penutur aktifnya banyak seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali. Kemudian, Model B untuk karakteristik bahasa daerah yang rentan untuk punah dengan jumlah penuturnya relatif banyak tetapi bahasa yang digunakan secara bersaing dengan bahasa daerah lainnya. Terakhir, Model C untuk karakteristik bahasa yang mengalami kemunduran dengan jumlah penutur sedikit dan dengan sebaran bahasa yang terbatas.

Adapun tujuan dilakukannya revitalisasi bahasa daerah dengan empat model pendekatan tersebut adalah untuk menghidupkan kembali bahasa daerah, menciptakan sejumlah penutur muda lokal, dan mendorong keberagaman bahasa. Salah satu kelompok masyarakat adat di Pulau Buru, Maluku, Timur Indonesia yang menggunakan bahasa Buru sebagai bahasa komunikasi atau bahasa identitas adatnya kini terancam punah. Bahasa Buru diklasifikasikan sebagai Model C sebagai bahasa yang mengalami kemunduran, kritis, dan terancam punah. Oleh karena itu, bahasa Buru menjadi salah satu bahasa sasaran pada program revitalisasi bahasa daerah. Padahal bahasa Buru yang termasuk dalam bahasa Austronesian telah digunakan sekitar 45.000 orang di pulau Buru dengan jumlah populasi saat ini mencapai 136,757 jiwa (Grimes,1991; BPS Kab. Buru,2020; Blust,2024). Data terbaru bahasa Buru mengalami penurunan jumlah penutur yang saat ini berkisar 5.000 dari 132.100 masyarakat Buru yang aktif menggunakan bahasa tersebut (Tahir,2020). Penurunan drastis ini dikaitkan dengan dominasi bahasa Indonesia dan pengaruh luas dari teknologi informasi modern, yang cenderung membatasi bahasa lokal (Tuharea et al. 2018).

Lebih lanjut, Erniati (2022) dalam penelitiannya mengkaji tentang kondisi penutur bahasa Buru dialek Rana di desa Wamlana menunjukkan hal serupa bahwa penggunaan bahasa Buru di desa Wamlana di ranah keluarga sudah mengalami pergeseran karena beberapa percakapan yang terjadi menggunakan bahasa Indonesia. Artinya pergeseran bahasa Buru berakibat terhadap sebagian masyarakat khususnya generasi muda sudah tidak fasih berbahasa daerah. Beberapa peneliti

menilai, ada beberapa faktor lain yang menyebabkan bahasa Buru mengalami kemunduran, beberapa diantaranya adalah *pertama*, entitas daya hidup bahasa sudah mengalami penurunan, terancam punah, atau secara kritis. *Kedua*, Bahasa Buru hanya dituturkan oleh sedikit orang dan tersebar luas<sup>1</sup>. *Ketiga*, adanya perkembangan teknologi informasi dan kurangnya kesadaran publik dan pemerintah dalam melestarikan bahasa lokal sebagai identitas mereka baik di lingkungan formal maupun non-formal (Tuharea et al. 2018; Simamora, 2023). *Terakhir*, adanya keterbatasan sumber daya manusia (Meithiana & Ansory, 2019).

Untuk merespon beberapa temuan masalah tersebut, langkah selanjutnya adalah melakukan *needs assessment* atau analisis kebutuhan. *Needs Assessment* diperlukan untuk mengumpulkan informasi dari informan terkait pengetahuan budaya atau adat istiadat masyarakat adat Buru serta komponen apa saja yang dibutuhkan dalam menghadapi kritisnya bahasa Buru. Peneliti menggunakan metode Delphi pada tahap analisis kebutuhan. Dalam pelaksanaannya, tiga orang tokoh adat Buru yang terdiri dari wakil raja Buru dari petuanan (wilayah adat) Leisela, dua pranata adat lainnya dari kepala *Soa* dan *Hinolong*, tiga perwakilan guru bahasa Buru yang telah mengikuti program revitalisasi bahasa Buru dari Balai Bahasa Provinsi Maluku, dan dua orang perwakilan komunitas budaya masyarakat adat Buru, dari Rana Lestari dijadikan sampel untuk dimintai pendapatnya dengan menjawab kuesioner melalui *G-Form*. Ada lebih dari enam belas pertanyaan penelitian yang dibagi menjadi tiga aspek utama. Aspek pertama adalah jenis pertanyaan yang berkaitan dengan pengetahuan dasar masyarakat adat Buru. Aspek kedua adalah tentang faktor-faktor penyebab utama bahasa Buru terancam punah. Aspek ketiga adalah tentang pelestarian bahasa Buru yang mencakup kebutuhan dasar untuk mengatasi punahnya bahasa Buru sekaligus solusi dalam menjaga dan merevitalisasi bahasa daerah masyarakat adat Buru. Hasil analisis kebutuhan yang dikumpulkan,

---

<sup>1</sup> Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Buku saku revitalisasi bahasa daerah* (Jakarta: Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat: 2021), hal.8

diuraikan sebagai berikut: 1). Pada aspek pertama tentang pengetahuan dasar masyarakat adat Buru. Para responden telah memahami dan mengetahui dasar-dasar budaya masyarakat adat Buru yang terdiri dari 8 adat istiadat yang tertuang pada PERDA Kab. Buru Tahun 2019. Kedelapan adat istiadat tersebut terdiri dari: bahasa Buru, ritual, pakaian adat, seni budaya, makanan khas, Dulan atau Sedekah, Huma Koin dan Baileo, serta ikat kepala Lestari. Beberapa komponen adat istiadat ini masih dijalankan oleh masyarakat adat Buru. Kemudian, untuk aspek pemberdayaan adat Buru perlu melibatkan masyarakat adat Buru dan non-Buru. Menurut responden pelestarian budaya dan adat istiadat sangatlah penting untuk lebih terbuka dengan masyarakat adat lainnya. Sementara itu, untuk aspek pengembangan adat istiadat yang meliputi upacara adat, seni budaya, dulan atau sedekah, dan makanan tradisional disarankan tidak boleh diadakan setiap tahun. Hal ini dirasa cukup sulit direalisasikan. 2). Pada aspek ke-dua tentang faktor penyebab utama bahasa Buru terancam punah. Para responden menilai ada beberapa faktor, seperti; a). Minimnya penyesuaian atau perbincangan di lingkungan keluarga menggunakan bahasa Buru; b). Akibat perkembangan zaman; c). Masyarakat non-Buru yang mendominasi wilayah pesisir; dan d). Tidak adanya kurikulum bahasa Buru di sekolah. Berdasarkan faktor-faktor diatas, untuk mencegah kepunahan bahasa Buru semakin meluas, responden menyarankan untuk membuat kurikulum bahasa Buru yang dapat diterapkan di sekolah dan menetapkan bahasa Buru sebagai mata pelajaran bahasa daerah wajib.

Berkaitan dengan program revitalisasi bahasa Buru yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Maluku bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Buru, beberapa responden dari guru bahasa Buru memiliki perbedaan pendapat mengenai efektivitas program revitalisasi Buru. Hanya salah satu guru bahasa Buru yang menyatakan program ini berjalan dengan baik. Sementara itu, menurut responden lainnya, program tersebut belum maksimal. Keefektifan program ini belum bisa dipastikan berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan dalam program revitalisasi bahasa Buru, siswa yang berpartisipasi dalam program ini hanya

berjumlah 10 orang per satuan pendidikan. Guru belum melihat apakah program ini sudah efektif atau belum dalam mengentaskan kepunahan bahasa Buru.

Oleh karena itu, para responden menyarankan perlu adanya program pelatihan untuk melestarikan bahasa Buru. Program ini harus menekankan penggunaan praktis bahasa Buru dalam kehidupan sehari-hari dan penggunaan metode pembelajaran kreatif dalam proses pembelajaran. Selain itu, memasukkan bahasa Buru ke dalam kegiatan adat, media, dan kurikulum pendidikan masyarakat adat juga sangat dianjurkan oleh para respon. 3). Aspek ke-tiga adalah tentang pelestarian bahasa Buru. Beberapa saran dari para responden menyebutkan keterampilan-keterampilan bahasa Buru yang diperlukan seperti memperkuat percakapan dalam komunikasi sehari-hari, berfokus pada kompetensi kemampuan berbahasa seperti praktek lapangan, dan dialog harian. Kemudian, pembelajaran kreatif, dialog keluarga berbahasa Buru, dan pertunjukan seni seperti lagu, puisi, pidato, dan cerita rakyat juga sangat disarankan. Beberapa responden juga menyarankan perlu memperkenalkan sejak dini menggunakan bahasa Buru dalam perayaan adat istiadat. Mengembangkan bahasa dasar Buru dan menciptakan lagu dan puisi berbahasa Buru. Terakhir, guru bahasa Buru harus dilatih untuk meningkatkan kompetensi guru sehingga kemampuan mengajar guru bahasa Buru semakin baik.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan tersebut, setidaknya ada tiga kebutuhan mendasar yang diperlukan dalam menangani masalah punahnya bahasa Buru, yaitu diperlukannya kurikulum muatan lokal Bahasa Buru di sekolah, menjadikan bahasa Buru sebagai mata pelajaran wajib di semua jenjang, dan perancangan kompetensi pembelajaran muatan lokal bahasa Buru (Pulhehe N., & Johan R.,2024). Faktanya, memang belum ada kurikulum yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Buru di seluruh jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Buru. Hal ini tentu menjadi kekhawatiran tersendiri atas ancaman punahnya bahasa Buru seperti bahasa Kayeli; salah satu bahasa daerah yang juga digunakan di Pulau Buru, khususnya pada



wilayah Kayeli. Itulah sebabnya, para tokoh adat dalam memberikan informasi dan tanggapan atas penurunan daya hidup bahasa Buru melalui *needs assessment*, mereka sangat mengharapkan pemerintah daerah Kabupaten Buru agar membuat kajian bahasa Buru lalu menetapkan bahasa Buru sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib di semua jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Buru. Seperti pada kajian awal peneliti, adanya program revitalisasi bahasa Buru melalui kebijakan Kemdikbudristek pada Merdeka belajar episode 17 adalah bentuk dukungan pemerintah pusat untuk merevitalisasi bahasa-bahasa daerah yang kini terancam punah dan perlu dilindungi entitas bahasanya. Tercatat sebanyak 26 SD dan 18 SMP di kabupaten Buru telah bergabung dalam program revitalisasi Bahasa Buru.

Dalam pelaksanaannya, program revitalisasi bahasa Buru dijadikan sebagai kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yang terdaftar sebagai peserta program revitalisasi. Program ini tidak dilaksanakan di seluruh sekolah pada jenjang SD dan SMP di Kabupaten Buru. Berdasarkan data BPS Kabupaten Buru (2020), tercatat ada 145 Sekolah dasar dan 53 untuk jenjang SMP. Lebih lanjut, peserta program yang telah terdaftar sekolahnya untuk mengikuti program revitalisasi Bahasa Buru akan mempelajari bahasa Buru dan memilih salah satu dari 6 mata lomba yang diminati, antara lain: lomba menulis dan membaca puisi, mendongeng, menyanyi, menulis cerpen, berpidato, berkomedit tunggal/ *stand up comedy*, dan menulis surat<sup>2</sup>. Keenam mata lomba tersebut akan digadang sebagai mata lomba utama pada acara Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat Nasional. Selama implementasi program revitalisasi bahasa daerah, para responden dari kalangan guru bahasa Buru yang telah mengikuti program revitalisasi bahasa Buru menyatakan program ini belum dipastikan apakah sudah berjalan secara efektif atau tidak. Menurut mereka, kendala terbesar adalah memastikan kompetensi bahasa Buru yang dicapai. Kendala ini muncul dikarenakan selama program revitalisasi bahasa Buru

---

<sup>2</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Menilik Upaya Ravitalisasi Bahasa Daerah di Provinsi Maluku*, <https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/berita-detail/3866/menilik-upaya-revitalisasi-bahasa-daerah-di-provinsi-maluku> diakses pada tanggal 15 Maret 2023

dilaksanakan, belum adanya petunjuk jelas sejauh mana siswa-siswi yang mengikuti program ini dapat mencapai kompetensi bahasanya. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk merancang kompetensi pembelajaran muatan lokal bahasa Buru pada jenjang sekolah dasar dengan mengadopsi capaian pembelajaran bahasa dan sastra dalam kurikulum Merdeka. Kompetensi bahasa yang dimaksud adalah kemampuan mendengar, kemampuan berbicara, kemampuan menulis, dan kemampuan membaca dalam bahasa Buru. Sementara itu, kompetensi pembelajaran akan mengarah pada rancangan capaian pembelajaran yang harus dimiliki peserta didik di akhir fase pembelajaran bahasanya. Selanjutnya, alasan pemilihan jenjang sekolah dasar pada penelitian ini dikarenakan untuk memfasilitasi kurangnya program pembelajaran bahasa Buru sejak dini yang dapat memperburuk resiko kritisnya bahasa Buru. Selain itu, pembelajaran bahasa daerah yang tidak dilaksanakan sejak dini dapat berdampak pada anak-anak yang tumbuh dengan kurangnya keterampilan bahasa leluhur mereka, yang mengarah pada menurunnya identitas budaya dan rasa kepemilikan terhadap warisan budaya mereka.

## 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan hasil studi pendahuluan dan hasil analisis kebutuhan terkait faktor-faktor yang mengakibatkan bahasa Buru mengalami kepunahan akibat tidak adanya kurikulum muatan lokal bahasa Buru di sekolah serta kondisi faktual yang dialami guru-guru utama program revitalisasi bahasa Buru di sekolah yaitu tidak adanya pedoman kompetensi pembelajaran bahasa Buru di sekolah, memantik peneliti membuat rumusan masalah umum dalam penelitian ini adalah “*Bagaimana desain kompetensi pembelajaran muatan lokal bahasa Buru pada jenjang sekolah dasar di Kabupaten Buru?*”. Sementara itu, untuk rumusan masalah khusus dalam penelitian ini, peneliti merumuskan beberapa pertanyaan yang terdiri dari:

1. Bagaimana kebutuhan kompetensi pembelajaran muatan lokal bahasa Buru pada jenjang sekolah dasar?

2. Bagaimana desain kompetensi pembelajaran muatan lokal bahasa Buru yang sesuai dengan jenjang sekolah dasar?
3. Bagaimana hasil penilaian ahli kurikulum dan ahli bahasa terhadap rumusan kompetensi pembelajaran muatan lokal bahasa Buru pada jenjang sekolah dasar?
4. Bagaimana pemanfaatan kompetensi pembelajaran muatan lokal bahasa Buru oleh guru di sekolah dasar?

### 1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah tentang desain kompetensi pembelajaran dan bahasa Buru sebagai muatan lokal jenjang sekolah dasar. Keduanya diuraikan sebagai berikut:

1. **Desain Kompetensi Pembelajaran.** Penelitian ini hanya mengkaji dan mendesain kompetensi pembelajaran. Kompetensi pembelajaran adalah capaian pembelajaran yang harus dicapai peserta didik di akhir setiap fase pembelajaran. Terminologi penggunaan kompetensi pembelajaran pada bahasa Buru merujuk pada capaian pembelajaran yang harus dicapai peserta didik dalam mempelajari bahasa Buru sesuai dengan PERMENDIKBUD No. 12 Tahun 2024. Luaran dari penelitian ini adalah dokumen kompetensi pembelajaran muatan lokal bahasa Buru jenjang sekolah dasar, yang diharapkan dapat membantu guru dalam mengukur ketercapaian pembelajaran bahasa Buru siswanya. Oleh karena itu, dalam dokumen kompetensi pembelajaran muatan lokal bahasa Buru yang dikembangkan adalah capaian pembelajaran bahasa Buru per fase, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran yang telah disesuaikan berdasarkan kompetensi bahasa, yaitu kemampuan reseptif (menyimak dan membaca & memirsa) dan kemampuan produktif (berbicara & mempresentasikan dan menulis), cakupan dan batasan materi sesuai fase akhir pembelajaran, serta contoh kegiatan pembelajaran sesuai fase akhir pembelajaran menggunakan pendekatan *genre-based*.

**2. Bahasa Buru Sebagai Muatan Lokal Jenjang Sekolah Dasar.** Fokus penelitian ini adalah untuk menjadikan bahasa Buru sebagai mata pelajaran muatan lokal bahasa daerah jenjang sekolah dasar di Kabupaten Buru. Bahasa Buru adalah salah satu bahasa daerah yang dituturkan oleh masyarakat adat Buru, Provinsi Maluku. Dengan status bahasa yang kini terancam punah, bahasa Buru dibutuhkan untuk dapat dipelajari sejak dini. Dokumen kompetensi pembelajaran muatan lokal bahasa Buru jenjang sekolah dasar sebagai luaran dari penelitian ini dapat menjadi tolak ukur pengembangan muatan lokal pembelajaran bahasa Buru pada tingkat lanjutan, yaitu tingkat sekolah menengah pertama (SMP). Jika merujuk pada kebijakan mata pelajaran muatan lokal, jenjang SD dan SMP merupakan kedua jenjang sekolah yang dibutuhkan untuk mempelajari bahasa daerah.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat tujuan umum dan tujuan khusus dalam penelitian ini. Adapun tujuan umum penelitian ini adalah untuk *“Memaparkan hasil rancangan kompetensi pembelajaran muatan lokal bahasa Buru pada jenjang sekolah dasar di Kabupaten Buru”*. Berdasarkan tujuan umum tersebut, maka empat tujuan khusus dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi kebutuhan kompetensi pembelajaran muatan lokal bahasa Buru jenjang sekolah dasar.
2. Untuk mendesain capaian pembelajaran muatan lokal bahasa Buru yang sesuai dengan jenjang sekolah dasar.
3. Untuk mengkaji hasil penilaian ahli kurikulum dan ahli bahasa terhadap rumusan kompetensi pembelajaran muatan lokal bahasa Buru pada jenjang sekolah dasar.
4. Untuk mendeskripsikan pemanfaatan kompetensi pembelajaran muatan lokal bahasa Buru oleh guru di sekolah dasar.

## 1.5 Manfaat Hasil Penelitian

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dalam memahami dan merancang desain kompetensi pembelajaran muatan lokal bahasa daerah khususnya bahasa Buru yang kini berstatus terancam punah. Kemudian, diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi rujukan teori, rancangan, dan pengembangan kompetensi pembelajaran atau capaian pembelajaran bahasa Buru yang sesuai dengan kompetensi bahasa yang berguna bagi satuan pendidikan di Kabupaten Buru maupun bagi peneliti lainnya dengan fokus kajian penelitian serupa tentang perancangan kompetensi pembelajaran muatan lokal bahasa daerah.

### 1. Manfaat teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kajian terhadap perancangan dan pengembangan kompetensi pembelajaran pada muatan lokal bahasa daerah khususnya untuk para akademisi. Pengembangan kompetensi pembelajaran atau capaian pembelajaran hingga menghasilkan dokumen kompetensi pembelajaran yang utuh termasuk di dalamnya pemetaan materi bahasa sesuai fase, Capaian Pembelajaran, Tujuan Pembelajaran, Alur Tujuan Pembelajaran, batasan materi per fase, dan contoh kegiatan berbasis pendekatan *genre-based* menjadi bagian-bagian penting pengembangan kompetensi pembelajaran muatan lokal bahasa daerah tingkat lanjut. Secara teoritis, penelitian ini kaya akan pengembangan pada kompetensi pembelajaran muatan lokal bahasa daerah jenjang sekolah dasar, dimana dalam mengembangkan kompetensi pembelajaran bahasa jenjang sekolah dasar membutuhkan dasar-dasar teori pembelajaran, teori akuisisi bahasa atau pemerolehan bahasa anak serta model desain kurikulum yang tepat dan sesuai kebutuhan.

### 2. Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan kepunahan bahasa Buru dengan tidak tersedianya kurikulum muatan lokal bahasa Buru di Kabupaten Buru. Bentuk rancangan kompetensi pembelajaran

muatan lokal Bahasa Buru dapat digunakan oleh guru sekolah dasar atau guru bahasa Buru dalam mengoptimalkan pembelajaran bahasa Buru di seluruh sekolah dasar di Kabupaten Buru. Dokumen kompetensi pembelajaran muatan lokal bahasa Buru dapat digunakan oleh guru kelas atau guru muatan lokal khusus untuk pembelajaran bahasa Buru. Dokumen ini juga dilengkapi contoh cakupan materi dasar bahasa Buru secara ilmu linguistik bahasa Buru serta contoh kegiatan pembelajaran bahasa Buru, sehingga mudah digunakan oleh para guru jenjang sekolah dasar. Secara praktis, luaran penelitian ini berupa dokumen kompetensi pembelajaran muatan lokal bahasa Buru dibutuhkan untuk merevitalisasi bahasa Buru pada setiap satuan Pendidikan jenjang sekolah dasar yang ada di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.

### **1.6 Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan pembatasan pengertian dalam penelitian ini, yang terdiri dari desain kompetensi pembelajaran, muatan lokal bahasa Buru, dan bahasa Buru jenjang sekolah dasar. Ketiganya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Desain Kompetensi Pembelajaran**, merupakan sebuah pendekatan komprehensif dengan tujuan untuk mengembangkan capaian pembelajaran yang efektif dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa serta mengintegrasikan kerangka kerja teoritis desain kurikulum yang sudah ada ke dalam bentuk pedoman dokumen kurikulum yang tepat. Konsep ini didasarkan pada gagasan bahwa berbagai komponen dapat digabungkan untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif, seperti prinsip-prinsip pedagogis, pemerolehan bahasa anak, dan pemahaman tentang kebutuhan siswa.
2. **Muatan Lokal bahasa Buru**, adalah pengembangan mata pelajaran muatan lokal bahasa Buru yang berisi materi dasar bahasa Buru secara ilmu linguistik dan pengetahuan budaya, seperti budaya *sirih pinang* dan *tanate* serta potensi daerah pulau Buru seperti teks deskripsi tentang tanaman minyak kayu putih. Muatan lokal bahasa Buru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk

mengembangkan minat dan bakatnya dalam pembelajaran bahasa daerah, sesuai dengan keunikan dan potensi daerahnya.

3. **Bahasa Buru Jenjang Sekolah Dasar**, adalah cakupan materi ajar yang diperuntukan untuk jenjang sekolah dasar. Secara ilmu linguistik, bahasa Buru memiliki kompleksitas tersendiri. Oleh karena itu, materi ajar yang dimasukkan dalam dokumen kompetensi pembelajaran bahasa Buru adalah materi-materi yang sudah dipertimbangkan berdasarkan tingkat kognivitas anak jenjang sekolah dasar, pemerolehan bahasa anak, dan teori-teori pembelajaran. Setiap fase akhir pembelajaran memiliki batasan-batasan materi. Ini bertujuan untuk membimbing para guru yang menggunakan dokumen kompetensi pembelajaran muatan lokal bahasa Buru dalam membatasi materi ajar kepada siswanya. Selain itu, materi-materi dasar dalam bahasa Buru juga memberikan kemudahan bagi para siswa untuk mempelajari bahasa Buru.

### 1.7 Struktur Organisasi Tesis

Dalam penulisan tesis, ada beberapa bagian struktur organisasi tesis yang memuat secara ringkas Bab I - Bab V. Kelima bagian tersebut memiliki cakupan dan batasan masing-masing. Berikut uraian singkat struktur organisasi tesis:

**BAB I**, bagian ini merupakan pendahuluan yang berisi uraian latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan struktur organisasi tesis.

**BAB II**, bagian ini menjelaskan cakupan teori-teori dasar yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu: Konsep Kompetensi Pembelajaran Bahasa, Muatan Lokal, Kajian Tentang Bahasa Buru, Desain Kompetensi Pembelajaran Bahasa, Desain Kompetensi Pembelajaran Bahasa Buru Menggunakan Model Tyler, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, dan Kerangka Berpikir Penelitian.

**BAB III**, bagian ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Adapun bagian yang dijelaskan, terdiri dari: Desain Penelitian, Partisipasi dan Tempat Penelitian, Instrumen Penelitian, Analisis Data, dan Prosedur Penelitian.

**BAB IV**, bagian ini menjelaskan tentang temuan dan pembahasan dari rumusan masalah yang dijelaskan pada Bab I. Adapun rincian bagian ini akan menjelaskan empat aspek, yang terdiri dari: Kompetensi Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Buru Jenjang Sekolah Dasar, Desain Kompetensi Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Buru Jenjang Sekolah Dasar, Penilaian Ahli Kurikulum Dan Ahli Bahasa Pada Rumusan Kompetensi Pembelajaran Bahasa Buru Jenjang Sekolah Dasar, dan Pemanfaatan Kompetensi Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Buru.

**BAB V**, bagian ini menjelaskan hasil penafsiran dan pemaknaan peneliti yang mencakup kesimpulan, implikasi, dan saran.